



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
KPKNL MAKASSAR
2025

KATA PENGANTAR

Melaksanakan evaluasi atas kegiatan atau program suatu instansi pemerintah menjadi tugas pejabat publik yang diberi wewenang untuk itu. Evaluasi Kinerja Organisasi sendiri merupakan metode penilaian terhadap pelaksanaan tugas unit-unit kerja dalam suatu organisasi sesuai dengan tujuan dan standar kinerja yang telah ditetapkan, sehingga kegiatan evaluasi sama pentingnya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Sedangkan evaluasi terhadap Laporan Kinerja merupakan suatu aktivitas analisis kritis, penilaian yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah.

Laporan Kinerja pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup laporan kinerja meliputi hal-hal yang terkait dengan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran organisasi instansi. Penyusunan laporan kinerja pada KPKNL Makassar Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian visi dan misi yang telah dilaksanakan pada KPKNL Makassar. Laporan Kinerja ini berperan sebagai sarana pembinaan, pengendalian, dan pengevaluasian, serta penilaian kinerja secara kualitatif dan kuantitatif, maupun sebagai perwujudan nyata transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPKNL Makassar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik/good governance.

Laporan Kinerja KPKNL Makassar Tahun Anggaran 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Kinerja berbasis Balance Scorecard (BSC) pada KPKNL Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang kepada Stakeholders.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun dengan harapan agar dapat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja, dan perbaikan program/kegiatan di masa datang, dan memberikan gambaran yang jelas dan transparan, sekaligus merupakan pertanggungjawaban atas

keberhasilan dan atau kegagalan dalam pencapaian Visi dan Misi DJKN sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban pada KPKNL Makassar untuk Tahun 2025.

Kinerja Organisasi pada KPKNL Makassar secara keseluruhan yang telah dicapai pada tahun 2025 merupakan hasil kerja keras dari seluruh jajaran pegawai di lingkungan KPKNL Makassar, untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan ke depan kinerja dapat dipertahankan serta senantiasa ditingkatkan melalui upaya-upaya inovasi. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Iwan Darma Setiawan



DAFTAR ISI

		Hal
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
IKHTISAR EKSEKUTIF		iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. LATAR BELAKANG	1
	B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
	C. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUES</i>)	7
	D. SISTEMATIKA LAPORAN	10
BAB II	RENCANA KINERJA	12
	A. RENCANA STRATEGIS	12
	B. PERJANJIAN KINERJA	14
	C. PENGUKURAN KINERJA	18
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	22
	A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	22
BAB IV	PENUTUP	36
Lampiran	38

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar tahun 2025, disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil (outcome). Laporan Kinerja KPKNL Makassar merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis.

Laporan Kinerja mempunyai fungsi sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan RI menuju terwujudnya good governance yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat. Selain itu, Laporan Kinerja juga merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pada setiap unit di lingkungan Kementerian Keuangan RI

Sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di lingkungan Kementerian Keuangan RI, KPKNL mempunyai tugas membantu Menteri Keuangan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, DJKN mempunyai visi “Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, telah ditetapkan 4 (empat) misi DJKN, yaitu:


1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara;
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum;
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategi organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN adalah:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
2. Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara;
3. Layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum;
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima..

Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih, maka dirumuskan sasaran strategis yang dituangkan dalam peta strategis. Untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu Three telah disusun Indeks kinerja utama (IKU). Indeks kinerja utama ini menjadi dasar dalam melakukan pengukuran kinerja suatu unit. Seberapa jauh tingkat ketercapaian IKU akan berpengaruh dengan ketercapaian tujuan unit yang telah ditetapkan.

Pencapaian target tahun 2025 ini berhasil dicapai bahkan melampaui. Dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan, telah didapatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Makassar Tahun 2025 sebesar 114,88%. KPKNL Makassar senantiasa berupaya dan bekerja keras dalam memenuhi target yang ditetapkan Kantor Pusat DJKN. Selanjutnya, di masa yang akan datang diharapkan semua capaian target tetap mencapai hasil yang lebih optimal dan akuntabel.



Dalam setiap *race*, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbang sia-sia; sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.

01.

Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (*Strategic Issues*)
- D. Sistematika Laporan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar merupakan instansi vertikal unit Eselon III yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

KPKNL Makassar sebagai kepanjangan tangan dari DJKN di daerah, dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk memegang prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*), yang salah satu azasnya adalah akuntabilitas, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam azas akuntabilitas, disebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Laporan Kinerja Tahun 2025 juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014).

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Permenpan Nomor 53/2014, bahwa "Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling

lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir”, maka setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 154/PMK.01/2021 berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat yang mempunyai tugas: “Melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.”

Tugas KPKNL Makassar berdasarkan PMK Nomor 154/PMK.01/2021 adalah melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam

melaksanakan tugasnya tersebut, KPKNL Makassar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan, negara, penilaian, dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. pelaksanaan administrasi KPKNL.

KPKNL Makassar dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dengan susunan organisasi terdiri dari Subbagian Umum, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Piutang Negara, Seksi Hukum dan Informasi, Seksi Kepatuhan Internal, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Subbagian Umum

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.

2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara.

3. Seksi Piutang Negara

Mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.

4. Seksi Hukum dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, Jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

5. Seksi Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional pada KPKNL Makassar terdiri dari Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah, Pelelang, dan Pranata Keuangan APBN.

KPKNL Makassar beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gedung Keuangan Negara Makassar I Lantai 2, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun wilayah kerja KPKNL Makassar meliputi 10 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, yang terdiri dari Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Selayar.

Terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL, perlu adanya usaha yang dimulai dari perencanaan yang baik dan pelaksanaan tugas yang disertai dengan evaluasi tugas yang objektif untuk mendukung kinerja lembaga yang baik. Usaha ini juga merupakan proses bertahap dan berkelanjutan secara terus menerus. Adanya proses yang berkelanjutan secara terus menerus, akan mendukung visi-misi lembaga yang pada tahap awal memerlukan internalisasi budaya kerja yang dapat dipahami bersama sebagai proses pembelajaran. Dengan membangun budaya kerja yang berkualitas dan bertanggungjawab keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat tercapai dengan menjadikan penilaian dan evaluasi kinerja, sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Makassar didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 33 orang pejabat/pegawai yang terdiri dari 1 orang Kepala Kantor, 1 orang Kepala Subbagian Umum, 4 orang Kepala Seksi, 4 orang Pelelang Ahli Muda, 6 orang Pelelang Ahli Pertama, 2 orang Penilai Pemerintah Ahli Muda, 1 orang Penilai Pemerintah Ahli Pertama, 1 Pranata Keuangan APBN Mahir, dan 13 orang Pegawai Pelaksana. Adapun komposisi pejabat/pegawai dimaksud dapat dilihat sebagaimana tabel dan diagram di bawah ini:

Tabel 1.1.

Komposisi Pegawai KPKNL Makassar Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan/Ruang

Tingkat Pendidikan	Golongan/Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
SD	-	-	-	-	-
SLTP	-	-	-	-	-
SLTA	-	-	-	-	-
DI	-	-	-	-	-

DIII	-	1	2	-	3
D4/S1	-	-	20	-	20
S2	-	-	6	4	10
S3	-	-	-	-	-
Jumlah	-	1	28	4	33

Tabel 1.2.
Komposisi Pegawai KPKNL Makassar Berdasarkan Umur dan Golongan/Ruang

Umur	Golongan/Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
< 21	-	-	-	-	-
21-30	-	1	-	-	1
31-40	-	-	10	-	10
41-50	-	-	15	-	15
> 50	-	-	3	4	7
Jumlah	-	1	28	4	33

Tabel 1.3.
Komposisi Pegawai KPKNL Makassar Berdasarkan Gender dan Golongan/Ruang

Jenis Kelamin	Golongan/Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
Perempuan	-	1	10	1	12
Laki-laki	-	-	18	3	21
Jumlah	-	3	28	4	33

Tabel 1.4.
Komposisi Fungsional Teknis KPKNL Makassar Lainnya

No.	Fungsional Teknis Lainnya	Struktural	Pelaksana	Jumlah
1	Juru Sita Piutang Negara	1	2	3
2	Pemeriksa Piutang Negara	-	1	1
3	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	2	3

C. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUES*)

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang, KPKNL Makassar memiliki peran strategis dan permasalahan utama sebagai berikut:

1. Peran Strategis KPKNL Makassar

a. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola Barang Milik Negara (BMN), KPKNL Makassar memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk:

- Optimalisasi penerimaan (*revenue center*), efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara terutama dalam utilisasi kekayaan negara;
- Optimalisasi pendayagunaan aset-aset yang terindikasi *idle* dan pengamanan kekayaan negara baik secara fisik, administrasi, dan hukum;
- Berperan penting terhadap upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penatausahaan dan pengelolaan BMN.

Dalam setiap tahapan pengelolaan BMN, dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, KPKNL Makassar senantiasa menekankan pada pentingnya membangun kerja sama yang lebih baik antara Pengelola Barang dengan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam pelaksanaan pengelolaan BMN. Membangun dan meningkatkan kemampuan (*capacity building*) dalam pengelolaan BMN pada tataran Kuasa Pengguna Barang akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan BMN, sehingga sinergi antara Pengelola Barang dan Kuasa Pengguna Barang menjadi sangat penting dan senantiasa ditingkatkan oleh KPKNL Makassar dalam rangka pengelolaan kekayaan negara yang transparan dan akuntabel, peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang baik dan benar.

b. Optimalisasi Penataan Aset Menuju *Revenue Center*

PNBP menjadi alternatif dalam menyokong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selain penerimaan dari sektor perpajakan. Melalui pengelolaan BMN *idle* yang baik dan berdaya guna, KPKNL Makassar sebagai Pengelola Barang dapat mengoptimalkan penggunaan/pemanfaatan aset *idle*, sehingga paradigma *cost center* tidak dominan dan dapat bergeser ke arah *revenue center*.

c. Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Sejak berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011, piutang macet yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Perbankan tidak lagi diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/DJKN. Namun demikian, pengurusan piutang negara di lingkungan KPKNL Makassar tetap dilaksanakan dengan tujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah dan Non Kementerian/Lembaga.

d. Pelayanan Lelang

Lelang merupakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Lelang juga merupakan pelaksanaan suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Makassar secara terus menerus mengupayakan penggalan potensi lelang baik lelang eksekusi maupun non eksekusi, sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*). Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya Risalah Lelang yang merupakan akta otentik/dokumen negara. Risalah Lelang berfungsi sebagai akta *van transport* untuk kepentingan peralihan hak. Dengan demikian, KPKNL Makassar diharapkan menjadi akselerator agar lelang lebih diminati masyarakat, seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah kerjanya. Tuntutan pelaksanaan lelang yang lebih transparan dan akuntabel telah dijawab dengan

inovasi pelaksanaan lelang secara elektronik (*E-Auction*). Diharapkan pelaksanaan lelang adaptif dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas.

e. Penilaian Kekayaan Negara

Layanan penilaian diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang. Pelaksanaan penilaian terhadap BMN/Barang Milik Daerah (BMD) merupakan bagian dari optimalisasi pengelolaan BMN/BMD. Penilaian tersebut antara lain akan digunakan dalam rangka penyusunan LKPP/Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), pemanfaatan, pemindahtanganan, penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan pengurusan piutang negara/daerah. Dengan demikian, hasil penilaian dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang yang optimal, efektif, dan efisien.

f. Memberikan Kontribusi Pemasukan PNBPN ke Kas Negara

Dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang negara, KPKNL Makassar memperoleh hasil berupa Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara, sedangkan dalam pelayanan lelang, KPKNL Makassar memperoleh hasil Bea Lelang (pembeli dan/atau penjual) dan PNBPN lelang lainnya termasuk Bea Lelang Pegadaian yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai PNBPN. Selain itu, secara tidak langsung dalam pengelolaan kekayaan negara, KPKNL Makassar juga memberikan kontribusi cukup besar dalam hal pemberian persetujuan pemanfaatan aset (sewa) dan persetujuan pemindahtanganan/ penjualan BMN.

2. Permasalahan Utama (*Strategic Issues*) KPKNL Makassar

- a. Dalam hal pengelolaan kekayaan negara, hingga saat ini masih dijumpai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang belum optimal dalam melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan aset, khususnya aset tetap. Hal ini terdeteksi antara lain dari belum tertib dan validnya data BMN yang ditatausahakan, dukungan dan kesadaran dalam mengoptimalkan penggunaan BMN, serta pemanfaatan BMN sesuai dengan ketentuan. Masih dijumpai BMN

bermasalah, yang meliputi BMN belum memiliki dokumen kepemilikan, BMN dikuasai pihak lain, BMN dalam sengketa, BMN belum ditemukan, dan BMN rusak berat tetapi belum dihapuskan. Hal tersebut sedikit banyak cukup menghambat tata kelola atas aset-aset tersebut selanjutnya. Tantangan dalam penyelesaian tugas khususnya sertifikasi BMN masih menemui beberapa kendala, namun dengan koordinasi yang baik dengan Kantor Pertanahan dan Satuan Kerja Kementerian/ Lembaga pemohon sertifikasi BMN berupa tanah akhirnya realisasi dapat tercapai dengan baik.

- b. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 hingga awal tahun 2022 masih memberikan dampak yang cukup besar terhadap sosial ekonomi masyarakat, khususnya daya beli masyarakat. Hingga tahun 2025 kondisi ekonomi mulai mengalami kenaikan secara perlahan tetapi belum terlalu berdampak pada pengeluaran per kapita sehingga belum memberikan indikasi daya beli masyarakat yang tinggi, begitu juga daya beli masyarakat terhadap pembelian lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Makassar, seringkali lelang yang dilaksanakan belum/tidak ada peminat.
- c. Selain hal tersebut di atas, dengan semakin bertambahnya frekuensi lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Makassar, semakin bertambah pula keberatan, perlawanan, ataupun gugatan terhadap pelaksanaan lelang, khususnya lelang eksekusi Hak Tanggungan yang merupakan sumber gugatan terbanyak yang ditangani oleh KPKNL Makassar.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPKNL Makassar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaiannya.

2. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi serta sistematika laporan.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2026.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menguraikan tentang Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap Pernyataan Kinerja Sasaran Strategis Organisasi sesuai dengan hasil Pengukuran Kinerja dan Realisasi Anggaran dengan membandingkan antara target dan realisasi tahun 2025 serta analisisnya.

5. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

6. Lampiran

Memuat lampiran dokumen Perjanjian Kinerja, Formulir Pengukuran Kinerja, dan dokumen-dokumen lainnya.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Makassar Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan untuk meningkatkan kinerja KPKNL Makassar di tahun-tahun yang akan datang.



Kecepatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat.

02.

Rencana Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja
- C. Pengukuran Kinerja

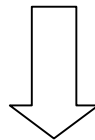
BAB II RENCANA KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis. Dalam mengemban tugas dan fungsi KPKNL Makassar mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

PERNYATAAN VISI

“Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan “



PERNYATAAN MISI

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advokasi yang profesional;
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum;
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu;

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPKNL Makassar, serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, level Kementerian Keuangan, dan level DJKN, KPKNL Makassar menetapkan 4 tujuan sebagaimana yang hendak dicapai DJKN pada tahun 2025-2029, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
2. Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara;
3. Layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum; dan
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan tersebut di atas, KPKNL Makassar menetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh KPKNL Makassar pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah:
 - a. peningkatan kontribusi kekayaan negara terhadap perekonomian akuntabel, inklusif dan berkelanjutan;
 - b. pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa;
 - c. pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
 - d. pengawasan dan pengendalian kekayaan negara yang efektif; dan
 - e. penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah:
 - a. peningkatan kontribusi lelang terhadap perekonomian akuntabel, inklusif dan berkelanjutan;
 - b. pengelolaan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa; dan
 - c. penerapan tata kelola lelang yang efektif.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan professional.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:

- a. peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian akuntabel, inklusif dan berkelanjutan;
- b. penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif;
- c. penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal; dan
- d. penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

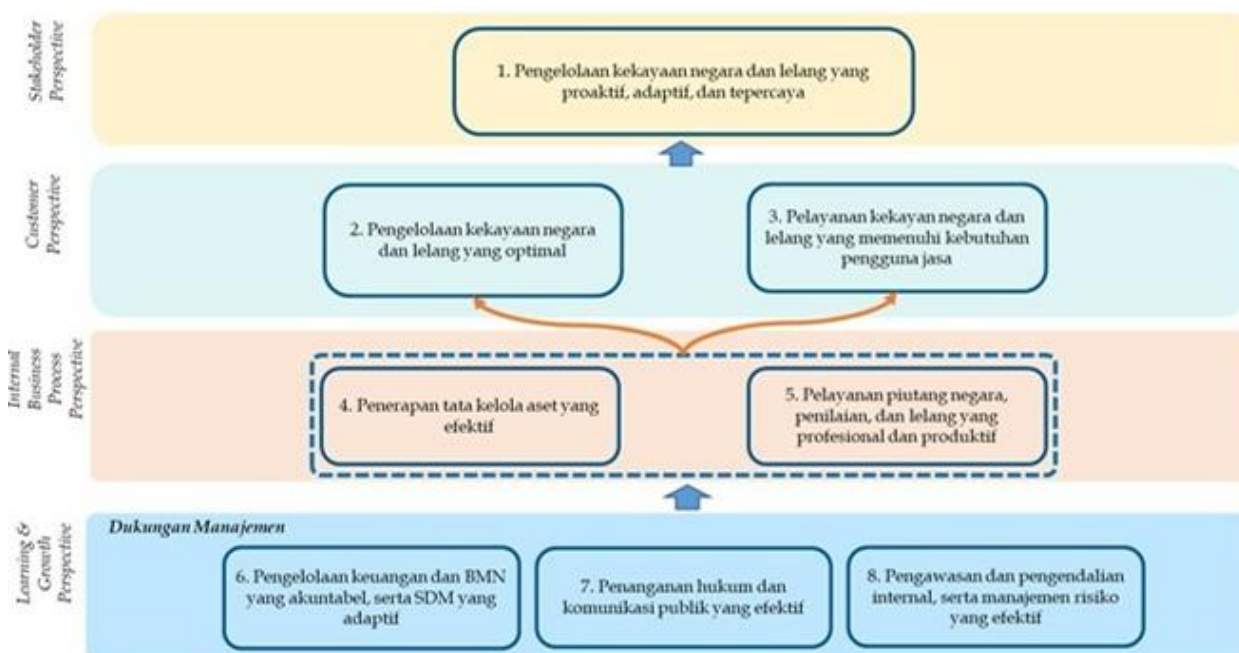
Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Makassar. Sasaran strategis KPKNL Makassar telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Makassar sesuai Bagan 2.1.

Peta Strategi KPKNL Makassar Tahun 2025 memuat 8 sasaran strategis. Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: (1) Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya; (2) Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal; (3) Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa; (4) Penerapan tata kelola aset yang efektif; (5) Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif; (6) Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif; (7) Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif; dan (8) Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif.

Bagan 2.1.
Peta Strategi KPKNL Makassar Tahun 2025

VISI
Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif dan terpercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045

PETA STRATEGIS KPKNL MAKASSAR



Dengan 8 sasaran strategis tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala KPKNL Makassar. Rencana kinerja tersebut merupakan target yang harus dilaksanakan dan menjadi ukuran kinerja pada KPKNL Makassar yang dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja KPKNL Makassar pada akhir tahun anggaran 2025. Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Kemenkeu Three DJKN terdiri dari 8 Sasaran Strategis (SS) dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU), dapat dilihat Penetapan Kinerja sebagai berikut :

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
		1b-CP Indeks integritas	89,37
		1c-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (52,2 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (980,2 M)
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (3 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%

5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP Indeks kualitas Kinerja Anggaran	100
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal , serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI WBK/WBBM	100

C. PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2025, KPKNL Makassar berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian IKU ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum 120.
2. Angka minimum 0.
3. Apabila dalam suatu IKU terdapat sub-IKU atau diukur dari beberapa komponen/variabel, maka angka maksimum indeks capaian sub-IKU atau komponen/variabel 120, dan angka minimum 0.
4. Ketentuan IKU *maximize* atau *minimize* yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target:
 - a. Indeks Capaian IKU dapat dikonversi menjadi 120, dengan ketentuan:
 - 1) IKU mengukur kualitas, waktu, atau biaya.
 - 2) Jumlah IKU yang dapat dikonversi maksimal 20% dari total IKU dalam KK (1 IKU dari 5 IKU, dan berlaku kelipatan).
 - 3) Memprioritaskan IKU *cascading* peta strategi (CP), kemudian IKU *cascading non peta*, dan IKU *non cascading* dalam pemilihan IKU yang dikonversi.
 - b. Penghitungan indeks capaian IKU ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Apabila realisasi IKU sama dengan target, di mana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120.
 - 2) Apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).
5. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:
 - a. Polarisasi *Maximize*

Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU merupakan realisasi yang lebih tinggi dari target. Formula yang digunakan untuk menghitung indeks capaian IKU sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Apabila IKU dengan polarisasi *maximize* memiliki target minus (target < 0), maka penghitungan indeks capaian IKU menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100$$

b. Polarisasi *Minimize*

Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU merupakan realisasi yang lebih kecil dari target. Formula yang digunakan untuk menghitung indeks capaian IKU sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100$$

Apabila indeks capaian IKU kurang dari 0 atau menghasilkan angka minus, maka indeks capaian IKU yang diakui 0.

Apabila IKU *minimize* memiliki target 0, maka indeks capaian IKU dihitung dengan menggunakan bantuan skala konversi. Skala konversi berkenaan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) Skala konversi dibuat dengan ketentuan:
 - a) Realisasi terbaik sesuai dengan target yaitu sebesar 0 dan setara dengan indeks capaian 100.
 - b) Realisasi terburuk merupakan realisasi terendah yang dapat ditoleransi pada suatu IKU. Angka tersebut ditentukan berdasarkan data historis, hasil penelitian atau *benchmark*. Angka realisasi terburuk harus dinyatakan secara jelas dalam manual IKU. Realisasi terburuk setara dengan indeks capaian 0. Skala konversi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Realisasi Terbaik	0	100 Indeks Capaian Indikator Kinerja
Realisasi Terburuk		0

2) Penghitungan Indeks Capaian IKU menggunakan formula sebagai berikut

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi terburuk} - \text{Realisasi}}{\text{Realisasi terburuk}} \times 100$$

3) Pada IKU dengan target IKU sebesar 0 tidak mungkin terdapat realisasi lebih kecil dari 0, sehingga indeks capaian maksimal IKU berkenaan 100. Penentuan konversi IKU ini menjadi 120 mengikuti ketentuan pada Indeks Capaian IKU.

c. Polarisasi *Stabilize*

Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU merupakan realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target. Formula yang digunakan untuk menghitung indeks capaian IKU sebagai berikut:

$$I_n = I_{n-1} + \frac{I_{n+1} - I_{n-1}}{C_{n+1} - C_n} (C_n - C_{n-1})$$

I_n = Indeks capaian

I_{n-1} = Indeks capaian di bawahnya

I_{n+1} = Indeks capaian di atasnya

C_a = Capaian awal = Realisasi/Target x 100

C_n = Capaian

Capaian	Indeks Capaian
100	120
90	100
67,5	75
45	50
22,5	25
0	0

= Apabila Realisasi > Target, maka $C_a = 100 - (C_a - 100)$

= note : C_a maksimum adalah 200

Apabila Realisasi < Target, maka $C_n = C_a$

C_{n-1} = Angka capaian di bawah C_n

C_{n+} = Angka capaian di atas C_n

1



Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran peralihan buah tanggung jawab yang berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika waktu, ritme, dan kepercayaan dipertaruhkan: tangan yang harus menanti tanpa menoleh, langkah yang tetap melaju meski ada mata mata, tongkat kecil yang harus berpindah dengan presisi, dan menemukan tempatnya yang baru pada saat yang tepat.

■ Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pelaksanaan pengukuran keberhasilan dan atau kegagalan dilakukan dengan melalui cara Pengukuran Kinerja (PK) sebagai gambaran secara menyeluruh atas kinerja dan merupakan informasi yang relevan/signifikan bagi pengambilan keputusan organisasi yang dapat diinterpretasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah. Evaluasi capaian kinerja disusun berdasarkan Kontrak Kinerja Kemenkeu Two, yang kemudian dijabarkan sebagai Kontrak Kinerja antara Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat dengan Kepala KPKNL Makassar. Pengukuran capaian kinerja KPKNL Makassar Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian NKO KPKNL Makassar Tahun 2025 sebesar 114,88% dengan rician sebagai berikut:

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(30%)							34,22%	
1	Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang Yang Proaktif,Adaptif Dan Terpercaya							114,05 %	34,22%
1a-CP	Tingkat Kepuasan Stakeholder Dan Pengguna Layanan	P/M	100	120	14%	30%	120%	120%	hijau
1b-CP	Indeks Integritas	P/L	89,37	94,12	19%	40%	105,32 %	105,32 %	hijau
1c-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100	128,99 %	14%	30%	128,99 %	120%	hijau
	Customer Perspective(20%)							22,80%	22,80%

2	Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang Yang Optimal							108,05 %	114,02 %
2a-CP	Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang Yang Optimal	P/L	100%	98,68%	19%	37%	98,68%	98,68%	kuning
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/L	100%	108,60 %	19%	37%	108,60 %	108,60 %	hijau
2c-CP	Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara	P/M	100%	652,18 %	14%	27%	652,18 %	120%	hijau
3	Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa							120%	
3a-N	Indeks Efektivitas Edukasi Dan Komunikasi	P/M	74	95,33	14%	100 %	128,82 %	120,00 %	hijau
	Internal Process Perspective (25%)							28,40%	28,40 %
4	Penerapan Tatakelola Aset Yang Efektif							120,00 %	113,59 %
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah Yang Disertifikatkan	P/M	100%	103,28 %	14%	50%	103,28 %	103,28 %	hijau
4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/M	100%	111,08 %	14%	50%	111,08 %	111,08 %	Hijau
5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian Dan Lelang Yang Profesional Dan Produktif							120%	
5a-CP	Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara	P/M	100%	125%	14%	33%	125%	120%	hijau
5b-CP	Tingkat Kualitas Layanan Penilaian	P/M	70%	111,90 %	14%	33%	159,86 %	120,00 %	hijau

5c-CP	Persentase Produktivitas Lelang	P/M	80%	120%	14%	33%	150%	120%	Hijau
	Learning & Growth Perspective (25%)							29,46%	29,46%
6	Pengelolaan Keuangan Dan Bmn Yang Akuntabel Serta SDM Yang Adaptif							120.00 %	117,83 %
6a-CP	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	P/M	100%	120%	14%	33%	120%	120.00 %	Hijau
6b-N	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Dan Jasa	P/M	100%	120%	14%	33%	120%	120.00 %	hijau
6c-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	P/M	80%	107%	14%	33%	133,75 %	120%	hijau
7	Penanganan Hukum Dan Komunikasi Publik Yang Efektif							117,87 %	
7a-CP	Indeks Penanganan Permasalahan Hukum	P/M	100	115,74	14%	50%	115,74 %	115,74 %	hijau
7b-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	P/M	80%	116%	14%	50%	145%	120%	hijau
8	Pengawasan Dan Pengendalian Internal, Serta Manajemen Risiko Yang Efektif							115,61 %	
8a-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Dan Risiko	P/M	80	88,98	14%	50%	111,23 %	111,23 %	hijau
8b-N	Indeks Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI WBK/WBBM	P/M	100	120	14%	50%	120%	120%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								114,88 %	hijau

Hasil kinerja kegiatan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada KPKNL Makassar Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. IKU 1a-CP Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan.

Kekayaan Negara adalah semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan /atau dimiliki oleh Negara. Untuk menjalankan amanat UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kekayaan Negara harus dikelola secara akuntabel dan produktif oleh Kementerian Keuangan. IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan memiliki target 100% dengan realisasi tahun 2025 sebesar 120%.

2. IKU 1b-CP Indeks Integritas

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kemenkeu dicerminkan antara lain melalui persepsi atas integritas organisasi, pemenuhan kriteria zona integritas wilayah bebas korupsi, dan pencapaian nilai maturitas penyelenggaraan SPIP yang baik.

Target KPKNL Makassar untuk IKU Indeks Integritas adalah sebanyak 89,37 dengan realisasi sebesar 94,12, sehingga capaiannya sebesar 105,32.

3. Iku 1c-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan, yang bersumber dari barang milik negara dan hasil pengurusan piutang negara.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang dapat berasal dari PNBK Kekayaan negara (aset), yang diperoleh melalui pemanfaatan BMN, PNBK Piutang negara yang diperoleh dari biaya administrasi pengurusan piutang negara dan PNBK Lelang yang diperoleh dari bea lelang.

IKU Persentase Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang diukur dengan nominal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBK) Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Piutang Negara, dan Lelang. Untuk PNBK BMN, memiliki target sebesar Rp29.500.000.000,00 target ini dapat dicapai dengan realisasi Rp54.551.461.168,00 atau mencapai 117,20%. Untuk PNBK Piutang Negara, targetnya adalah Rp38.500.000,00 dan realisasinya sebesar Rp98.907.374,00 atau 131,11%. Sedangkan untuk PNBK Lelang, targetnya sebesar Rp22.668.000.000,00 dan capaiannya adalah Rp34.727.984.731,00 atau 153,20%. Dari rata-rata ketiga realisasi nominal PNBK tersebut, maka capaian dari IKU Persentase Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang tahun 2025 adalah 128,99%.

4. IKU 2a-CP Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang Pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja pemeliharaan. Optimalisasi BMN dapat terlaksana dengan menerapkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D dan memperhatikan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

Target KPKNL Makassar untuk IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara tahun 2025 adalah sebanyak 100% dengan realisasi tahunan sebesar 98,68%. Akar permasalahan IKU tidak dapat tercapai karena Target IKU Optimalisasi aset pada umumnya hanya dilakukan Penggunaan sendiri oleh satker. Penggunaan sendiri oleh satker hanya mendapat indeks 60 dalam pengukuran IKU. Objek yang menjadi target optimalisasi tidak memungkinkan untuk dilakukan pemanfaatan.

5. IKU 2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang

Lelang memiliki peranan dalam perekonomian nasional yaitu :

- a. Pengelolaan Keuangan Negara melalui penjualan BMN/D, barang milik desa, barang milik BUMN/D, perorangan, aset harta pailit, barang temuan, aset dari tegahan Bea dan Cukai, aset bank dalam likuidasi, dan sebagainya.
- b. Penegakan Hukum melalui berbagai jenis lelang eksekusi. Seperti Lelang Eksekusi PUPN, Lelang Eksekusi UUHT, Lelang Eksekusi Pengadilan, Rampasan Kejaksaan, Sitaan KPK, Gadai, Lelang PT Pegadaian, dan sebagainya.
- c. Peningkatan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di bidang lelang antara lain sebagai Pejabat Lelang Swasta (Kelas II), para pegawai Kantor PL II, mendukung penjualan barang UMKM, mendukung penjualan hasil hutan, dan sebagainya.

Dari pelaksanaan lelang yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, didapatkan hasil lelang yang di representasikan oleh Pokok Lelang dan PNBPN Lelang. Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang.

Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pejabat Lelang (PL) Kelas II dalam periode tertentu.

Target KPKNL Makassar untuk IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang tahun 2025 adalah sebesar Rp.980.200.000.000,- dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp.1.064.538.030.882,- atau sebesar 108,60%. Target KPKNL Makassar untuk Pokok Lelang Pejabat Lelang Kelas I adalah sebesar Rp.320.020.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.655.198.179.082,- atau sebesar 177,62%. Sedangkan pada target Pokok Lelang Pegadaian sebesar Rp.660.180.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.409.339.851.800,- atau sebesar 57,04%. Dari rata-rata realisasi hasil lelang (pokok

lelang) tersebut, maka capaian dari IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang tahun 2025 adalah sebesar 108,60%

6. IKU 2c-CP Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara

KU Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara menggambarkan efektifitas kinerja PUPN dalam melakukan pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh K/L/Pemda/BUN maupun pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh badan/lembaga khusus/badan hukum publik berdasarkan PP 28/2022 jls. PMK 52/2024 yang ditandai dengan adanya penurunan nilai saldo piutang Negara yang diurus PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh berkas piutang Negara yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

- a. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- b. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- c. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- d. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- e. Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL;

Pembayaran angsuran atau pelunasan yang dapat diperhitungkan termasuk berasal dari :

- a. Hasil lelang PUPN terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain, termasuk lelang yang tidak terjual pada lelang berikutnya Penyerah Piutang menjadi pembeli;
- b. Hasil pengalihan hak secara paksa terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dengan kriteria khusus (debt to asset swap);
- c. Hasil penjualan tanpa melalui lelang dan penebusan.

IKU Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara tahun 2025 memiliki target sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan realisasi yang diperoleh sebesar Rp19.565.497.060,69 atau sebesar 652,18%.

7. IKU 3a-CP Indeks Efektivitas Edukasi Dan Komunikasi

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJKN kepada baik pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman pelaku proses bisnis di internal DJKN dan pengguna layanan DJKN sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja secara DJKN umum. Target KPKNL Makassar untuk IKU Indeks Efektivitas Edukasi Dan Komunikasi tahun 2025 adalah sebanyak 74 dengan realisasi sebesar 95,33.

9. IKU 4a-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah Yang Disertipikatkan

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Ruang lingkup pengukuran IKU TA 2025 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat yang clean and clear (K1), melengkapi dokumen bidang tanah yang not clean but clear (K2), menyelesaikan permasalahan hukum dan fisik atas bidang tanah yang not clean and not clear (K3), dan ganti nama terhadap bidang tanah menjadi Pemerintah RI c.q. KL, update dan validasi di SIMAN (K4). IKU ini juga mengukur pelaksanaan sertifikasi BMN Hulu Migas, untuk outputnya dipersamakan dengan sertifikasi pada BMN K/L, dan BMN Hulu Migas mempunyai karakteristik khusus terkait dengan SHP harus atas nama Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang. disamping itu Pengguna Barang adalah Menteri ESDM, Kuasa Pengguna Barang adalah SKK Migas, sedangkan Kontraktor KKKS selaku pelaksana di lapangan.

Target untuk IKU Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah Yang Disertipikatkan pada KPKNL Makassar tahun 2025 adalah 2.960 bidang, sedangkan realisasinya

adalah 3.057 bidang tanah. Capaian IKU sampai Desember 2025 realisasi sebesar 103,28%.

10. IKU 4b-CP IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan) sebagai bukti. Objek Evaluasi Kinerja BMN tahun 2025 berfokus pada BMN dengan kode barang 2010104001 dan 4010101001, KPKNL dapat melakukan evaluasi selain objek tersebut apabila diperlukan dengan terlebih dahulu melaporkan secara berjenjang ke Kantor Pusat c.q. Dit. PKKN melalui Kanwil disertai dengan alasan dan data dukung. Terhadap BMN dengan kode barang tersebut yang sudah dievaluasi pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilakukan kembali evaluasi kinerjanya di tahun 2025.

Target KPKNL Makassar untuk IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) pada tahun 2025 adalah 100% dengan capaian IKU-nya sebesar 111,08%.

11. IKU 5a-CP Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara

IKU Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara menggambarkan upaya PUPN berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jls. PP No. 28 Tahun 2022 jls. PMK 240/PMK.06/2016 jls. PMK No. 52/2024 melakukan pengurusan piutang negara maupun piutang badan/lembaga khusus/badan hukum publik, mulai dari penerimaan BKPN sampai dengan tahap selesai atau optimal. Selain itu, juga menggambarkan K/L /Pemda mengupayakan penyelesaian piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke

PUPN secara optimal berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020 atau PMK No. 137/PMK.06/2022.

Komponen perhitungan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara sebagai kriteria capaian IKU berupa :

1. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen : 1,2)
 - a. Pelunasan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL);
 - b. Penarikan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS);
 - c. Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPNL/SPPNS di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
2. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen : 1,1)
 - a. Pengembalian berupa penerbitan Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara (SPPPN);
 - b. Pengurusan piutang Negara telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT);
 - c. Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPPN/PSBDT di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
3. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN telah optimal (bobot komponen : 1)
 - a. Berkas Piutang Negara pada K/L telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO);
 - b. Berkas Piutang Negara pada Pemda telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);

yang terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya serta belum tercatat di aplikasi focusPN. PPNTO dan PPDTO diupload pada aplikasi focusPN dan dapat diperhitungkan sebagai capaian setelah dilakukan review oleh Bidang PN Kanwil DJKN dan di validasi oleh Dit. PKKN.

Target KPKNL Makassar untuk IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara pada tahun 2025 adalah 60 BKPN dengan capaian IKU-nya sebesar 75 BKPN atau 125%.

12. IKU 5b-CP Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

Sebagaimana RPJMN Tahun 2025 – 2029 yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, transformasi tata Kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif, salah satunya untuk mewujudkan pelayanan strategis berkualitas, arah kebijakan difokuskan pada transformasi proses bisnis. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital juga didorong melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi dan penerapan satu data.

Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional diukur melalui Layanan Penilaian yang Tepat Waktu, Basis Data yang Akurat dan Hasil Penilaian yang mencerminkan kondisi optimal.

Target KPKNL Makassar untuk IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian tahun 2025 adalah sebanyak 70% yang tercapai sebesar 111,90%.

13. IKU 5c-CP Persentase Produktivitas Lelang

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang) dan Pejabat Lelang Kelas II (target Kanwil). Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Untuk IKU Persentase Produktivitas Lelang tahun 2025 memiliki target 80% dan realisasi yang dicapai oleh KPKNL Makassar adalah 120%.

14. IKU 6a-CP Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 sebagaimana diubah dengan PMK 107 Tahun

2024 pasal 249 ayat (7). Nilai kinerja anggaran Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Dalam pelaksanaan anggaran, KPKNL Makassar memiliki target sebesar 100% dan realisasinya tahun 2025 adalah sebesar 120%

15. IKU 6b-N Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Dalam Pengadaan Barang/Jasa terdapat 5 (lima) indikator yang diukur yaitu SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing Katalog, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, dan E-Kontrak. Target KPKNL Makassar untuk IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2025 adalah 100% dengan capaian IKU-nya sebesar 115%.

16. IKU 6c-N IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai merupakan IKU yang mengukur hard competency dari seluruh pegawai KPKNL Makassar. IKU ini mengukur dua komponen:

- a. Penguatan Budaya dan Bintel Pejabat Administrator
- b. Pemenuhan JP dan Pemanggilan Pelatihan

Target KPKNL Makassar dalam hal Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai adalah 80% dengan realisasi sebesar 115%.

17. IKU 7a-CP Indeks Penanganan Permasalahan Hukum

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

- a. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan (dengan bobot 80%), dan
- b. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (dengan bobot 20%).

Target Indeks Penanganan Permasalahan Hukum pada KPKNL Makassar tahun 2025 memiliki target 100% dengan realisasi sebesar 115,74%.

18. IKU 7b-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Dalam PPID, KPKNL Makassar memiliki target sebesar 80 dan realisasinya tahun 2025 adalah sebesar 116 dengan capaian indeks 145%.

19. IKU 8a-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Dan Risiko

Dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Di sisi lain, manajemen risiko memiliki peran strategis dalam mengenali potensi masalah atau dampak negatif yang dapat muncul dari ketidakpastian atau perubahan dalam lingkungan operasional, dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengurangi risiko atau mengatasi konsekuensinya terhadap sasaran organisasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022.

Adapun target IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Dan Risiko KPKNL Makassar tahun 2025 sebesar 80 dan realisasi sebesar 88,87 sehingga capaian mencapai 111,09%.

20. IKU 8b-N Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kemenkeu dicerminkan antara lain melalui persepsi atas integritas organisasi, pemenuhan kriteria zona integritas - wilayah bebas korupsi, dan pencapaian nilai maturitas penyelenggaraan SPIP yang baik. Adapun target IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti KPKNL Makassar tahun 2024 sebesar 98 dan realisasi mencapai 102,04%.

Secara keseluruhan, kinerja KPKNL Makassar Tahun Anggaran 2025 telah mencapai target dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 114,88% %.



Garis finis bukan sekadar titik akhir, melainkan simpul makna yang merangkul kerja kolektif: kecepatan individu, ketepatan serah-terima, dan kepercayaan yang dijaga di setiap meter lintasan. Di momen terakhir ini, keberhasilan tidak lahir dari satu pelari yang paling kuat, tetapi dari rangkaian keputusan yang konsisten, menjaga ritme, meminimalkan jeda, dan tetap selaras pada tujuan yang sama.

04.

Penutup

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025. Laporan Kinerja Tahun 2025 juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014).

Berdasarkan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun 2025 KPKNL Makassar masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dalam tugasnya, utamanya dalam tugas pengelolaan kekayaan negara, dan pelayanan lelang. Pandemi covid-19 yang mulai terjadi pada awal tahun 2020 masih berdampak efeknya yang cukup memberikan tantangan dan menghambat penyelesaian beberapa program kerja pada KPKNL Makassar. Dalam situasi dan kondisi yang sangat fluktuatif ini, tugas pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang semakin berat dan penuh tantangan.

Selain berdampak secara langsung terhadap sektor kesehatan dan ekonomi, juga mempengaruhi aktivitas masyarakat pada umumnya. Namun demikian, jajaran KPKNL Makassar senantiasa berusaha mengatasi tantangan dan hambatan yang dihadapi, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Hal ini tampak pada pencapaian IKU pada tahun 2025 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.

KPKNL Makassar harus dapat bertindak lebih cepat dan akurat terhadap current issue yang berkembang pada masyarakat pengguna jasa dengan jalan menetapkan berbagai skala prioritas. melalui identifikasi dan verifikasi serta evaluasi sebagai tindak lanjut dari perwujudan pelayanan prima serta cerminan transparansi, akuntabilitas dan performance kinerja instansi pemerintah sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang good governance. Hal ini harus benar-benar diperhatikan oleh semua SDM yang ada pada KPKNL Makassar sebagai umpan balik untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Semoga Visi dan Misi DJKN dengan semangat EWAKO

dapat diwujudkan sebagaimana mestinya agar institusi DJKN tetap eksis pada masa yang akan datang.

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Iwan Darma Setiawan

Lampiran





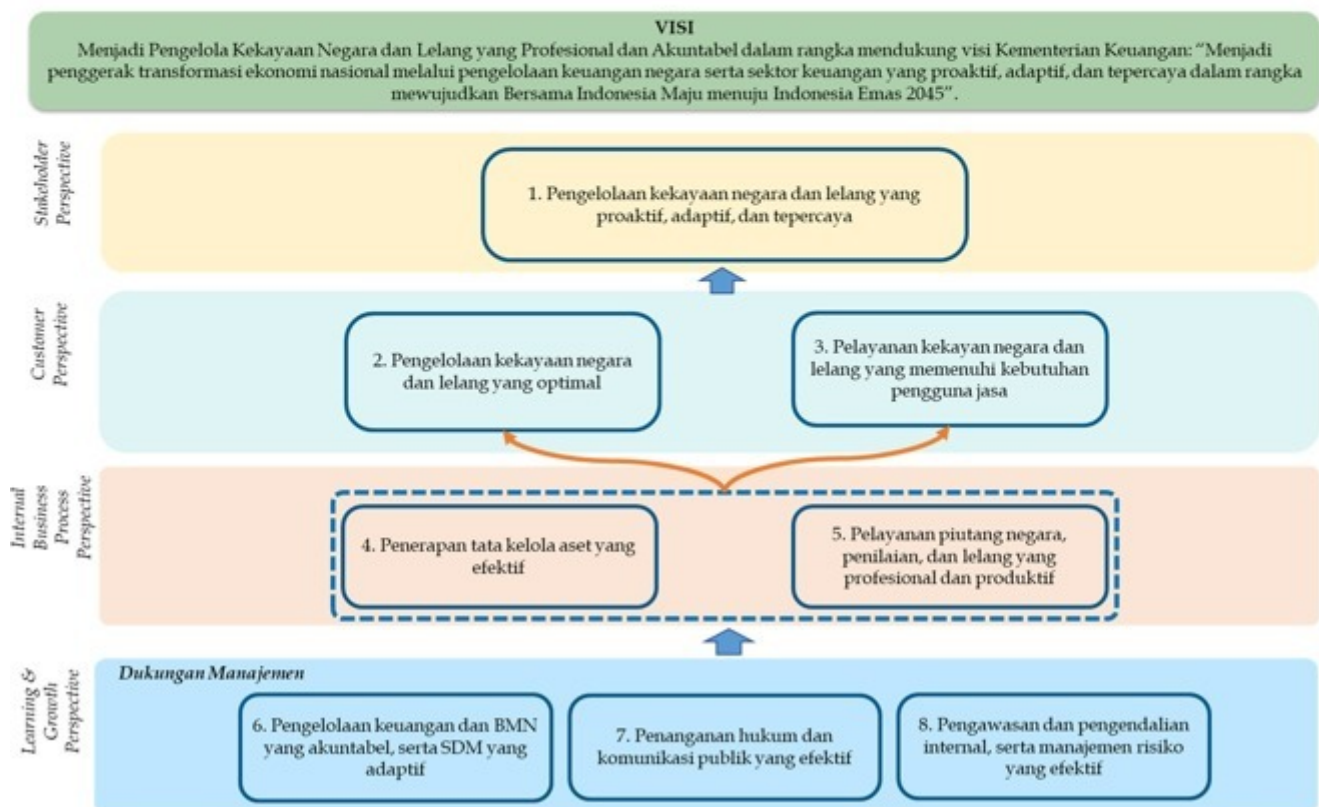
PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-2/WKN.15/2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
MAKASSAR
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
MAKASSAR
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
		1b-CP	Indeks integritas	100
		1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (52,2 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (980,2 M)
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (3 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks kualitas Kinerja Anggaran	100
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100



Program/Kegiatan 2025**Anggaran**

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Rp931,147,000

Kegiatan

1. Komunikasi, Edukasi dan Standardisasi Rp26,467,000
2. Pengelolaan Aset Rp904,680,000

Program:

Dukungan Manajemen Rp12,889,785,000

Kegiatan

1. Legislasi dan Litigasi Rp185,268,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Rp12,656,285,000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik Rp31,332,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal Rp16,900,000

Kota Makassar, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Sulawesi Selatan,
Tenggara, dan Barat



Ditandatangani Secara Elektronik
Wibawa Pram Sihombing

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Makassar



Ditandatangani Secara Elektronik
Goklas Tunggul Partoho



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
MAKASSAR
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1b-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (52,2 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (980,2 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (3 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
6a-CP	Indeks kualitas Kinerja	100	100	100	100	100	100	100



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	Anggaran							
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal , serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

Kota Makassar, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Makassar



Ditandatangani Secara Elektronik
Goklas Tunggul Partoho



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MAKASSAR
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Januari - Desember	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/di manfaatkan; Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan; Q3: Pelaksanaan Monitoring; Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Daftar Aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan; Q2: Laporan Kegiatan Monitoring; Q3: Laporan Kegiatan Monitoring; Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan.	Q1-Q4	1. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	0



Kota Makassar, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Makassar



Ditandatangani Secara Elektronik
Goklas Tunggul Partoho



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Goklas Tunggul Partoho		NAMA	Wibawa Pram Sihombing
NIP	19760428 200212 1 001		NIP	19760906 199903 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Makassar		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Makassar		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	Penerima Layanan
		Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (52,2 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (980,2 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (3 M)	Penerima Layanan



3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas Kinerja Anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal , serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



PERILAKU KERJA		
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Kota Makassar, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Wibawa Pram Sihombing
19760906 199903 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Goklas Tunggul Partoho
19760428 200212 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	32 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1b-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (52,2 M)
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (980,2 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (3 M)
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-CP	Indeks kualitas Kinerja Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								



Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kota Makassar, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Wibawa Pram Sihombing
19760906 199903 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Goklas Tunggul Partoho
19760428 200212 1 001





**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-2a/WKN.15/2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
MAKASSAR
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
MAKASSAR
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP Indeks integritas	100
		1b-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
		1c-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (69,2 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (980,2 M)
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (3 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5b-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100%
		6c-CP Indeks kualitas Kinerja Anggaran	100
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100



Program/Kegiatan 2025**Anggaran**

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Rp931,147,000

Kegiatan

1. Komunikasi, Edukasi dan Standardisasi Rp26,467,000
2. Pengelolaan Aset Rp904,680,000

Program:

Dukungan Manajemen Rp12,889,785,000

Kegiatan

1. Legislasi dan Litigasi Rp185,268,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Rp12,656,285,000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik Rp31,332,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal Rp16,900,000

Makassar, 17 November 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Sulawesi Selatan,
Tenggara, dan Barat



Ditandatangani Secara Elektronik
Wibawa Pram Sihombing

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Makassar



Ditandatangani Secara Elektronik
Iwan Darma Setiawan



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
MAKASSAR
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (69,2 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (980,2 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (3 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5b-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
6a-N	Persentase pengembangan	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	kompetensi pegawai							
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6c-CP	Indeks kualitas Kinerja Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal , serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

Makassar, 17 November 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Makassar



Ditandatangani Secara Elektronik
Iwan Darma Setiawan



**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MAKASSAR
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Makassar, 17 November 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Makassar



Ditandatangani Secara Elektronik
Iwan Darma Setiawan



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Oktober s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Iwan Darma Setiawan		NAMA	Wibawa Pram Sihombing
NIP	19710414 199301 1 001		NIP	19760906 199903 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Makassar		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Makassar		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (69,2 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (980,2 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (3 M)	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 17 November 2025



3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas Kinerja Anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal , serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



PERILAKU KERJA		
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Makassar, 17 November 2025

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Iwan Darma Setiawan
19710414 199301 1 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Wibawa Pram Sihombing
19760906 199903 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 17 November 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Oktober s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	31 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (69,2 M)
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (980,2 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (3 M)
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74



4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5b-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6c-CP	Indeks kualitas Kinerja Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								



Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Makassar, 17 November 2025

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Iwan Darma Setiawan
19710414 199301 1 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Wibawa Pram Sihombing
19760906 199903 1 001





PIAGAM MANAJEMEN RISIKO
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MAKASSAR
KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI SELATAN, TENGGARA DAN BARAT
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025
NOMOR: 2/WKN.15/2025

Dalam rangka pencapaian sasaran organisasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar, saya menyatakan bahwa:

1. Perumusan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi Risiko telah dilaksanakan sesuai ketentuan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Rencana mitigasi Risiko yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin.
3. Pemantauan dan review akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko.

Makassar, 30 Januari 2025
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Makassar



Ditandatangani Secara Elektronik
Goklas Tunggul Partoho



DAFTAR RISIKO
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MAKASSAR
TAHUN 2025

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Periode	Residual Harapan
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1.1 Adanya keluhan/aduan layanan yang belum selesai ditindaklanjuti	8	5
		1.2 Adanya pelaksanaan pemanfaatan BMN K/L yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	14	10
2.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2.1 Optimalisasi Penggunaan BMN <i>Underutilized</i> Tidak Terlaksana Sesuai Rencana	9	5
		2.2 Adanya Pembatalan Lelang	22	15
		2.3 Piutang negara yang di setor rendah	17	10
3.	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3.1 Kesalahan berulang terhadap prosedur ataupun dokumen	13	10
		3.2 Persetujuan permohonan penjualan BMN dengan hasil lelang yang optimal (<i>upside risk</i>)	18	19
4.	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4.1 BMN Berupa Tanah Tidak Dilengkapi Dokumen Kepemilikan (Sertipikat Hak Pakai)	8	5
		4.2 Evaluasi Kinerja BMN Tidak Dapat Diimplementasikan Secara Efektif	8	5
5.	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5.1 Rendahnya Pelunasan Berkas Kasus Piutang Negara	9	5
		5.2 Adanya hambatan dalam pemberian layanan penilaian yang akuntabel dan profesional	6	5
		5.3 Pembagian lelang dan jenis lelang yang tidak merata	6	5
6.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6.1 <i>Ownership</i> pegawai terhadap organisasi	11	10
		6.2 Tidak tercapainya target output yang telah ditetapkan	3	1



No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Periode	Residual Harapan
		6.3 Pelaksanaan pengerjaan konstruksi/ renovasi yang terlambat/ tidak sesuai jadwal/ ketentuan/ kontrak	8	5
		6.4 Adanya pegawai yang tidak mengikuti pelatihan/ Banyak terjadi pengunduran diri diklat	4	1
7.	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7.1 Putusan Pengadilan Kalah	8	5
		7.2 Ketidaktepatan Waktu Tindak Lanjut Permintaan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana DJKN <i>(rekomendasi risiko)</i>	8	5
8.	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8.1 Awareness terkait kewajiban kinerja pegawai yang belum optimal	8	5
		8.2 Kurang optimalnya implementasi rencana kerja keberlanjutan ZI-WBK/WBBM	8	5

Makassar, 30 Januari 2025
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar



Ditandatangani Secara Elektronik
Goklas Tunggul Partoho



**KPKNL MAKASSAR
PER TRIWULAN IV
TAHUN 2025**

(1)	(2)	(3)	(4)	Target 2025	Target Q4 2025	Q4					
						Oktober		November		Desember	
						(20)	%	(21)	%	(22)	%
Pengelolaan kekayaan negaradan lelang yang proaktif, adaptif dan terpercaya.											
1	1a-CP	P/M	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100	100	92,31		92,31		120	
	Capaian IKU					92,31		92,31		120	
	1b-CP	P/L	Indeks Integritas	89,37	89,37	94,12		94,12		94,12	
	Capaian IKU					105,32		105,32		105,32	
	1c-CP	P/M	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	100%						
	a.		Target/Realisasi PNPB BMN	Rp 29.500.000.000	Rp 46.546.212.000	Rp 48.808.078.764	104,86%	Rp 54.551.461.168	117,20%	Rp 54.551.461.168	117,20%
	b.		Target/Realisasi PNPB Piutang Negara	Rp 38.500.000	Rp 75.440.000	Rp 79.783.547	105,76%	Rp 85.256.274	113,01%	Rp 98.907.374	131,11%
	c.		Target/Realisasi PNPB Lelang	Rp 22.668.000.000	Rp 22.668.000.000	Rp 24.963.275.262	110,13%	Rp 30.650.603.883	135,22%	Rp 34.727.984.731	153,20%
	TOTAL		Jumlah target/realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Rp 52.206.500.000	Rp 69.289.652.000	Rp 73.851.137.573		Rp 85.287.321.325		Rp 89.378.353.273	
	Capaian IKU					106,58%		123,09%		128,99%	
Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal.											
2	2a-CP	P/L	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	100%	64,91%		64,91%		98,68%	
	Capaian IKU					64,91%		64,91%		98,68%	
	2b-CP	P/L	Persentase Realisasi Pokok Lelang	Rp 980.200.000.000	Rp 980.200.000.000	Rp 777.791.015.883	79,35%	Rp 944.991.914.195		Rp 1.064.538.030.882	
	PL I		KPKNL Makassar	Rp 320.020.000.000	Rp 320.020.000.000	451.193.786.983,00	140,99%	Rp 568.428.199.095	177,62%	Rp 655.198.179.082	
	Pegadaian			Rp 660.180.000.000	Rp 660.180.000.000	326.597.228.900,00	49,47%	Rp 376.563.715.100	57,04%	Rp 409.339.851.800	
	CAPAIAN IKU					79,35%		96,41%		108,60%	
	2c-CP	P/M	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	Rp 3.000.000.000	Rp 3.000.000.000	Rp 3.080.151.223,37		Rp 3.232.475.438,83		Rp 19.565.497.060,69	
CAPAIAN IKU					102,67%		107,75%		652,18%		
Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa											
3	3a-N	P/M	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	95		95,33		95,33	
	Capaian IKU					128,38		128,82		130,41	
Penerapan tatakelola aset yang efektif.											
4	4a-CP	P/M	Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertifikatkan	MAX/TLK	100%	61,22%		93,85%		103,28%	
			KPKNL Makassar	2.960	2.960	1.812		2.778		3.057	
	Capaian IKU					61,22%		93,85%		103,28%	
	4b-CP	P/M	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	100%	103,36%		111,08%		111,08%	
	KPKNL Makassar		Komponen A	876	876	895		895		895	
		Komponen B	44	44	46		64		64		
Capaian IKU					103,36%		111,08%		111,08%		



(1)	(2)	(3)	(4)	Target 2025 (5)	Target Q4 2025 (19)	Q4				
						Oktober (20)	%	November (21)	%	Desember (22)
5	Pelayanan piutang negara, penilaian dan lelang yang profesional dan produktif					48808				
	5a-CP	P/M	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%					
			KPKNL Makassar	60	60	71		71		75
	Capaian IKU					119,71%		119,71%		125,00%
	5b-CP	P/M	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	112,74%		113,17%		111,90%
	CAPAIAN IKU			-		161,06%		161,67%		159,86%
	5c-CP	P/M	Persentase produktivitas lelang	80%	80%	106,84%		114,71%		120%
CAPAIAN IKU					133,55%		143,39%		150,00%	
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel serta SDM yang adaptif									
	6a-CP	P/M	Indeks kualitas Kinerja Anggaran	100%	100%	100		98,01		98,01
	Capaian IKU					120,00%		120,00%		120,00%
	6b-N	P/M	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100%	100%	115		115		120
	Capaian IKU			100%		115%		115%		120%
6c-N	P/M	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	80%	107%		107%		107%	
Capaian IKU					134%		134%		134%	
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif.									
	7a-CP	P/M	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	115,07		115,07		115,74%
	Capaian IKU					115,07		115,07		115,74
	7b-N	P/M	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	116		116		116%
Capaian IKU					145%		145%		145%	
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif.									
	8a-N	P/M	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	88,87		88,87		88,98
	Capaian IKU					111,09		111,09		111,23
	8b-N	P/M	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI WBK/WBBM	100	100	100		100		100
Capaian IKU					120		120		120,00	

Mengetahui,
Kepala Kantor,

Iwan Darma Setiawan
NIP 197604282002121001

NJLAI KJNERJA ORGANISASI
KPKNL MAKASSAR
PERIODE TRIWULAN I (MARET)
TAHUN 2025

Kode	IKU	V/C	Target Q1	Realisasi Q1 Maret	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective (30%)							33,57%	
1	Pengelolaan kekayaan negaradan lelang yang proaktif,adaptif dan terpercaya.							111,91%	
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	P/M	20	269,25	14%	30%	13,46	120,00%	hijau
1b-CP	Indeks Integritas	P/L	100	100	19%	40%	100,00%	100,00%	hijau
1c-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	215,13%	14%	30%	215,13%	120,00%	hijau
	Customer Perspective(20%)							22,05%	
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal.							100,51%	
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	P/L	50%	33,33%	19%	37%	66,66%	66,66%	merah
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/L	100%	190,34%	19%	37%	190,34%	120,00%	hijau
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	P/M	100%	137,19%	14%	27%	137,19%	120,00%	hijau
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							120,00%	
3a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	74	100,00	14%	100%	135,14%	120,00%	hijau
	Internal Process Perspective (25%)							30,00%	
4	Penerapan tatakelola aset yang efektif.							120,00%	
4a-CP	Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertifikatkan	P/M	5%	41,32%	14%	50%	826,35%	120,00%	hijau
4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/M	15%	18,40%	14%	50%	122,67%	120,00%	hijau
5	Pelayanan piutang negara, penilaian dan lelang yang profesional dan produktif							120,00%	
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	P/M	100%	151,67%	14%	33%	151,67%	120,00%	hijau
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	P/M	70%	97,09%	14%	33%	138,70%	120,00%	hijau
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	30%	157,57%	14%	33%	525,22%	120,00%	hijau
	Learning & Growth Perspective (25%)							28,05%	
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel serta SDM yang adaptif							120,00%	
6a-CP	Indeks kualitas Kinerja Anggaran	P/M	100%	120,00%	14%	33%	120,00%	120,00%	hijau
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	P/M	100%	120,00%	14%	33%	120,00%	120,00%	hijau
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	20%	27,00%	14%	33%	135,00%	120,00%	hijau
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif.							109,15%	
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	P/M	100	98,30	14%	50%	98,30%	98,30%	kuning
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	P/M	80%	142,50%	14%	50%	178,13%	120,00%	hijau
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif.							107,47%	
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	P/M	80	91,95	14%	50%	114,94%	114,94%	hijau
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI WBK/WBBM	P/M	100	100	14%	50%	100,00%	100,00%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								113,68%	hijau

Mengetahui,
Kepala Kantor,

Kepala Seksi KI
Selaku Sub Manajer Kinerja Organisasi



datangi secara elektronik
Goklas Tunggal Partoho
NIP 197604282002121001



ditandatangani secara elektronik
Idawati
NIP 197312271994032002

**NILAI KINERJA ORGANISASI
KPKNL MAKASSAR
PERIODE TRIWULAN II
TAHUN 2025**

Kode	IKU	V/C	Target Q2	Realisasi Q2 Juni	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective (30%)							36,00%	
1	Pengelolaan kekayaan negaradan lelang yang proaktif,adaptif dan terpercaya.							120,00%	
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	P/M	50	92,31	14%	30%	184,62%	120,00%	hijau
1b-CP	Indeks Integritas	P/L	100	120	19%	40%	120,00%	120,00%	hijau
1c-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	155,22%	14%	30%	155,22%	120,00%	hijau
	Customer Perspective(20%)							23,70%	
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal.							116,96%	
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	P/L	60%	67,00%	19%	37%	111,67%	111,67%	hijau
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/L	100%	143,11%	19%	37%	143,11%	120,00%	hijau
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	P/M	100%	195,92%	14%	27%	195,92%	120,00%	hijau
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							120,00%	
3a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	74	95,56	14%	100%	129,14%	120,00%	hijau
	Internal Process Perspective (25%)							29,08%	
4	Penerapan tatakelola aset yang efektif.							112,61%	
4a-CP	Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertifikatkan	P/M	40%	42,09%	14%	50%	105,23%	105,23%	hijau
4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/M	50%	61,18%	14%	50%	122,36%	120,00%	hijau
5	Pelayanan piutang negara, penilaian dan lelang yang profesional dan produktif							120,00%	
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	P/M	100%	212,22%	14%	33%	212,22%	120,00%	hijau
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	P/M	70%	101,54%	14%	33%	145,06%	120,00%	hijau
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	40%	48,00%	14%	33%	120,00%	120,00%	hijau
	Learning & Growth Perspective (25%)							28,98%	
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel serta SDM yang adaptif							115,00%	
6a-CP	Indeks kualitas Kinerja Anggaran	P/M	100%	120,00%	14%	33%	120,00%	120,00%	hijau
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	P/M	100%	105%	14%	33%	105,00%	105,00%	hijau
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	40%	60,00%	14%	33%	150,00%	120,00%	hijau
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif.							117,09%	
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	P/M	100	114,18	14%	50%	114%	114,18%	hijau
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	P/M	80%	142,50	14%	50%	178,13	120,00%	hijau
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif.							115,70%	
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	P/M	80	89,12	14%	50%	111,40%	111,40%	hijau
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI WBK/WBBM	P/M	100	120	14%	50%	120,00%	120,00%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								117,75%	hijau

Mengetahui,
Kepala Kantor,

Kepala Seksi KI
Selaku Sub Manajer Kinerja Organisasi



ditandatangani secara elektronik
Darma Setiawan
NIP 197104141993011001



ditandatangani secara elektronik
Idawati
NIP 197312271994032002

**NILAI KINERJA ORGANISASI
KPKNL MAKASSAR
PERIODE TRIWULAN III
TAHUN 2025**

Kode	IKU	V/C	Target Q3	Realisasi Q3 September	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective (30%)							36,00%	
1	Pengelolaan kekayaan negaradan lelang yang proaktif,adaptif dan terpercaya.							120,00%	
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	P/M	70	92,31	14%	30%	131,87%	120,00%	hijau
1b-CP	Indeks Integritas	P/L	100	120	19%	40%	120,00%	120,00%	hijau
1c-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	217,61%	14%	30%	217,61%	120,00%	hijau
	Customer Perspective(20%)							22,39%	
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal.							103,86%	
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	P/L	80%	64,91%	19%	37%	81,14%	81,14%	kuning
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/L	100%	114,69%	19%	37%	114,69%	114,69%	hijau
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	P/M	100%	131,55%	14%	27%	131,55%	120,00%	hijau
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							120,00%	
3a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	74	95,00	14%	100%	128,38%	120,00%	hijau
	Internal Process Perspective (25%)							30,00%	
4	Penerapan tatakelola aset yang efektif.							120,00%	
4a-CP	Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertifikatkan	P/M	60%	100,68%	14%	50%	167,79%	120,00%	hijau
4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/M	75%	91,26%	14%	50%	121,68%	120,00%	hijau
5	Pelayanan piutang negara, penilaian dan lelang yang profesional dan produktif							120,00%	
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	P/M	100%	130,56%	14%	33%	130,56%	120,00%	hijau
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	P/M	70%	115,21%	14%	33%	164,59%	120,00%	hijau
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	70%	98,34%	14%	33%	140,49%	120,00%	hijau
	Learning & Growth Perspective (25%)							29,34%	
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel serta SDM yang adaptif							118,33%	
6a-CP	Indeks kualitas Kinerja Anggaran	P/M	100%	119,98%	14%	33%	119,98%	119,98%	hijau
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	P/M	100%	115%	14%	33%	115,00%	115,00%	hijau
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	60%	73,00%	14%	33%	121,67%	120,00%	hijau
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif.							118,23%	
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	P/M	100	116,45	14%	50%	116,45%	116,45%	hijau
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	P/M	80%	145,00	14%	50%	181,25	120,00%	hijau
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif.							115,54%	
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	P/M	80	88,87	14%	50%	111,09%	111,09%	hijau
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI WBK/WBBM	P/M	100	120	14%	50%	120,00%	120,00%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								117,73%	hijau

Mengetahui,
Kepala Kantor,

Kepala Seksi KI
Selaku Sub Manajer Kinerja Organisasi



ditandatangani secara elektronik
Darma Setiawan
NIP 197104141993011001



ditandatangani secara elektronik
Idawati
NIP 197312271994032002

**NILAI KINERJA ORGANISASI
KPKNL MAKASSAR
PERIODE TRIWULAN IV
TAHUN 2025**

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4 Desember	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective (30%)							34,22%	
1	Pengelolaan kekayaan negaradan lelang yang proaktif,adaptif dan terpercaya.							114,06%	34,22%
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	P/M	100	120	14%	30%	120,00%	120,00%	hijau
1b-CP	Indeks Integritas	P/L	89,37	94,12	19%	40%	105,31%	105,31%	hijau
1c-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	128,99%	14%	30%	128,99%	120,00%	hijau
	Customer Perspective(20%)							22,80%	22,80%
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal.							108,05%	114,02%
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	P/L	100%	98,68%	19%	37%	98,68%	98,68%	kuning
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/L	100%	108,60%	19%	37%	108,60%	108,60%	hijau
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	P/M	100%	652,18%	14%	27%	652,18%	120,00%	hijau
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							120,00%	
3a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	74	95,33	14%	100%	128,82%	120,00%	hijau
	Internal Process Perspective (25%)							28,40%	28,40%
4	Penerapan tatakelola aset yang efektif.							107,18%	113,59%
4a-CP	Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertifikatkan	P/M	100%	103,28%	14%	50%	103,28%	103,28%	hijau
4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/M	100%	111,08%	14%	50%	111,08%	111,08%	hijau
5	Pelayanan piutang negara, penilaian dan lelang yang profesional dan produktif							120,00%	
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	P/M	100%	125,00%	14%	33%	125,00%	120,00%	hijau
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	P/M	70%	111,90%	14%	33%	159,86%	120,00%	hijau
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80%	120,00%	14%	33%	150,00%	120,00%	hijau
	Learning & Growth Perspective (25%)							29,46%	29,46%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel serta SDM yang adaptif							120,00%	117,83%
6a-CP	Indeks kualitas Kinerja Anggaran	P/M	100%	120,00%	14%	33%	120,00%	120,00%	hijau
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	P/M	100%	120%	14%	33%	120,00%	120,00%	hijau
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	80%	107%	14%	33%	133,75%	120,00%	hijau
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif.							117,87%	
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	P/M	100	115,74	14%	50%	115,74%	115,74%	hijau
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	P/M	80%	116%	14%	50%	145,00%	120,00%	hijau
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif.							115,61%	
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	P/M	80	88,98	14%	50%	111,23%	111,23%	hijau
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI WBK/WBBM	P/M	100	120	14%	50%	120,00%	120,00%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								114,88%	hijau

Mengetahui,
Kepala Kantor,



ditandatangani secara elektronik
Iwan Darma Setiawan
NIP 197604282002121001

Kepala Seksi KI
Selaku Sub Manajer Kinerja Organisasi



ditandatangani secara elektronik
Idawati
NIP 197312271994032002

